

Kinerja Keuangan, Opini Audit, dan Tingkat Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia: Bukti Empiris Periode 2018-2023

Dewi Ardika¹, Afni Sirait^{2*}

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, Indonesia
dewiardika13@mail.com, afni.sirait@upnyk.ac.id

*Corresponding Author

Submitted: Dec 9, 2025

Accepted: Jan 04, 2026

Published: Jan 12, 2026

ABSTRACT

This study examines the relationship between financial performance, audit opinions, and corruption levels in Indonesian provincial governments during the period 2018–2023. Financial performance is proxied by efficiency, effectiveness, fiscal independence, and fiscal dependency ratios, while audit opinions are measured based on opinions issued by the Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Corruption is measured using the number of corruption cases reported by Indonesia Corruption Watch (ICW). Using panel data from ten provinces with the highest corruption cases and applying multiple linear regression analysis, the results show that fiscal dependency has a significant effect on corruption levels, whereas efficiency, effectiveness, fiscal independence, and audit opinions do not exhibit significant individual effects. Nevertheless, the variables jointly explain variations in corruption levels, indicating that corruption in local governments is better understood as a systemic governance issue rather than the outcome of isolated financial performance indicators or audit results.

.Keywords: *Audit opinion; Corruption level; Financial performance; Financial ratio; Indonesia governance*

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi permasalahan serius dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), skor *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia pada tahun 2022 dan 2023 berada pada angka 34 dari 100, yang menunjukkan masih tingginya persepsi korupsi di sektor publik. Sepanjang tahun 2023, tercatat 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka dan estimasi kerugian negara mencapai Rp28,41 triliun. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa sektor pemerintahan masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Suyatmiko, 2021 berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, seperti penguatan peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pembentukan komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta penerapan kebijakan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam perspektif teori agensi (Jensen & Meckling, 1976), pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang mengelola sumber daya publik atas nama masyarakat sebagai prinsipal. Ketidakseimbangan informasi dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat membuka peluang terjadinya perilaku oportunistik, termasuk korupsi. Oleh karena itu kinerja keuangan daerah dan opini audit dipandang sebagai indikator penting dalam menilai akuntabilitas fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan publik (Shidqi & Arfiansyah, 2025). Korupsi yang terjadi di pemerintahan daerah tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menurunkan efisiensi pengelolaan anggaran dan meningkatkan ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Li et al., 2023).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji hubungan antara kinerja keuangan daerah, opini audit, dan tingkat korupsi namun menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Triya Setia Ningsih (2022) menemukan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi, sedangkan Zulhaerini et al., (2025) menyatakan adanya pengaruh signifikan. Sementara itu Azizi

Yusuf & Hari Suryaningrum (2022) menemukan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara indikator kinerja keuangan, opini audit, dan korupsi belum sepenuhnya dapat dijelaskan secara konklusif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menguji indikator kinerja keuangan dan opini audit secara terpisah, penelitian ini berargumen bahwa korupsi di pemerintah daerah merupakan fenomena tata kelola yang bersifat sistematis. Oleh karena itu, indikator-indikator individu mungkin tidak cukup untuk menjelaskan tingkat korupsi apabila tidak dianalisis secara kolektif. Pendekatan ini menempatkan kinerja keuangan dan opini audit sebagai satu kesatuan mekanisme pengawasan dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan daerah yang diukur melalui rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan ketergantungan, serta opini audit terhadap tingkat korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2018-2023. Penelitian ini difokuskan pada sepuluh provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi, dengan pertimbangan bahwa periode observasi tersebut bertepatan dengan penguatan kebijakan reformasi birokrasi dan integritas melalui implementasi Zona Integritas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam memahami korupsi sebagai permasalahan tata kelola pemerintahan daerah, serta menjadi dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan penguatan akuntabilitas fiskal pengawasan publik.

STUDI LITERATUR

Landasan Teori

Agency Theory (Teori Agensi)

Dalam konteks pemerintahan daerah, teori agensi menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen yang diberi kewenangan mengelola sumber daya publik (Jensen & Meckling, 1976). Permasalahan utama dalam hubungan ini muncul akibat asimetri informasi dan perbedaan kepentingan, di mana agen memiliki akses informasi yang lebih besar dibandingkan prinsipal. Kondisi tersebut menciptakan ruang bagi perilaku oportunistik, termasuk penyalahgunaan anggaran dan praktik korupsi, terutama ketika mekanisme pengawasan tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, teori agensi menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk menjelaskan bagaimana kelemahan monitoring dan akuntabilitas fiskal dapat berkontribusi terhadap variasi tingkat korupsi di pemerintah daerah.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya fiskal secara efisien, efektif dan akuntabel (Falah & Mubarokiyah, 2022). Dalam perspektif teori agensi, kinerja keuangan yang baik menunjukkan bahwa agen menjalankan mandat pengelolaan keuangan sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga dapat menekan peluang penyimpangan anggaran. Sebaliknya, kinerja keuangan yang lemah atau tidak transparan mencerminkan lemahnya mekanisme pengendalian dan meningkatkan risiko korupsi. Penelitian ini menggunakan rasio efisiensi, efektivitas, kemandirian dan ketergantungan sebagai indikator kinerja keuangan karena keempat rasio tersebut secara langsung berkaitan dengan tingkat akuntabilitas fiskal dan potensi konflik keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam memanfaatkan sumber daya anggaran secara optimal. Tingkat efisiensi yang rendah dapat mencerminkan pemborosan anggaran dan lemahnya pengendalian belanja (Khalimatussa'diah & Haliah, 2025). Selanjutnya, tingkat efisiensi yang rendah dapat mengindikasikan pemborosan anggaran, yang berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi melalui mark-up, pengadaan fiktif atau penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Dalam kerangka teori agensi, rendahnya efisiensi mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap agen, sehingga meningkatkan peluang perilaku oportunistik. Namun demikian, inefisiensi anggaran tidak selalu berkorelasi langsung dengan

tingkat korupsi, karena inefisiensi juga dapat disebabkan oleh keterbatasan birokrasi atau faktor struktural lainnya.

Studi internasional oleh Li et al. (2023) dalam *Journal of Development and Economic Studies* membuktikan bahwa peningkatan efisiensi pengeluaran publik memiliki korelasi negatif dengan tingkat korupsi dan penyalahgunaan dana, karena semakin efisien penggunaan anggaran, semakin kecil ruang bagi praktik koruptif untuk terjadi. Sementara itu Rafsanjani & Sumiati (2024) menegaskan bahwa tingkat efisiensi anggaran yang tinggi mencerminkan pengelolaan keuangan publik yang baik dan berpotensi menekan praktik penyimpangan penggunaan dana publik. Penelitian lain oleh Siswanto & Maylani (2022) juga menemukan bahwa daerah dengan efisiensi belanja yang lebih baik menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, rasio efisiensi diperkirakan memiliki keterkaitan dengan tingkat korupsi di pemerintah daerah.

H1: Rasio efisiensi diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target yang ditetapkan (Alif et al., 2025). Tingkat efektivitas yang rendah mencerminkan lemahnya kapasitas pengelolaan pendapatan dan akuntabilitas fiskal. Dalam kondisi tertentu, tekanan untuk mencapai target pendapatan dapat mendorong menipulasi penerimaan atau praktik penyimpangan sebagai bentuk kompensasi atas kinerja yang tidak optimal. Namun, efektivitas pendapatan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan basis pajak daerah, sehingga hubungannya dengan korupsi tidak selalu bersifat langsung dan deterministik. Penelitian oleh Alif et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas pemerintahan yang diukur melalui kinerja keuangan berpengaruh signifikan terhadap tingkat korupsi dengan akuntabilitas sebagai faktor penguat. Dengan demikian, rasio efektivitas diperkirakan berkaitan dengan variasi tingkat korupsi di pemerintah daerah.

H2: Rasio Efektivitas diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian mengukur kemampuan daerah untuk membiayai aktivitas pemerintahannya sendiri tanpa bergantung pada dana transfer (Tartila Seisha Syaputri et al., 2025). Kemandirian fiskal yang tinggi menunjukkan tingkat otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar terhadap masyarakat sebagai prinsipal. Sebaliknya, kemandirian yang rendah dapat melemahkan akuntabilitas karena pemerintah daerah lebih bergantung pada pemerintah pusat, sehingga pengawasan publik lokal menjadi kurang efektif dan berpotensi meningkatkan risiko korupsi dan penyimpangan oleh agen. Purba et al. (2024) menjelaskan bahwa peningkatan kemandirian fiskal sebagai hasil dari desentralisasi justru dapat menaikkan indeks korupsi apabila kontrol institusional lemah. Penelitian Maria et al. (2021) menemukan bahwa kemandirian daerah yang tinggi dapat meningkatkan potensi korupsi apabila tidak diimbangi dengan pengawasan dan transparansi yang memadai. Oleh karena itu, hubungan antara rasio dan tingkat kemandirian bersifat kontekstual dan dipengaruhi tata kelola daerah.

H3: Rasio kemandirian diasosiasikan dengan tingkat korupsi.

Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan fiskal yang tinggi dapat mengindikasikan lemahnya kemandirian dan meningkatkan potensi moral hazard, terutama jika pengawasan terhadap penggunaan dana transfer tidak optimal (Khalimatussadiyah & Haliah, 2025). Purba et al. (2024) menambahkan bahwa keseimbangan antara PAD dan dana transfer perlu dijaga untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Dalam perspektif teori agensi, kondisi ini dapat memperbesar konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Namun, dana transfer pusat umumnya disertai dengan mekanisme pengawasan, pelaporan, dan aturan penggunaan yang lebih ketat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian Nurcahyo & Mahi (2022) menemukan bahwa penerimaan Dana Transfer Umum dari pusat (DTU) memiliki hubungan positif signifikan terhadap probabilitas

korupsi di pemerintahan daerah, sedangkan Dana Transfer Khusus (DTK) yang pengawasannya lebih ketat malah menunjukkan hubungan negatif dengan korupsi. Oleh karena itu, ketergantungan fiskal dapat memiliki dua implikasi yang berbeda yakni, meningkatkan risiko penyimpangan ketika pengawasan lemah, atau justru menekan praktik korupsi ketika mekanisme kontrol pusat berjalan efektif.

H4: Rasio ketergantungan diasosiasikan dengan tingkat korupsi.

Opini Audit

Opini audit merupakan pernyataan profesional auditor atas kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan (Budiantoro et al., 2025). Dalam teori agensi, opini audit berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menunjukkan kepatuhan tinggi terhadap standar akuntansi dan praktik pengelolaan yang baik (Triya Setia Ningsih, 2022). Namun, opini audit lebih berfokus pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara formal dan kepatuhan terhadap standar akuntansi, sehingga tidak selalu mampu mendeteksi praktik korupsi yang bersifat operasional atau terjadi di luar pencatatan akuntansi. Oleh karena itu, meskipun opini audit mencerminkan kualitas pelaporan keuangan, keberadaannya tidak selalu berbanding lurus dengan rendahnya tingkat korupsi. Penelitian oleh Safitri et al., (2025) menemukan bahwa temuan audit memiliki pengaruh yang lebih besar dalam meningkatkan jumlah korupsi daripada opini audit. Oleh karena itu, hubungan antara opini audit dan tingkat korupsi diperkirakan tidak bersifat langsung dan linier.

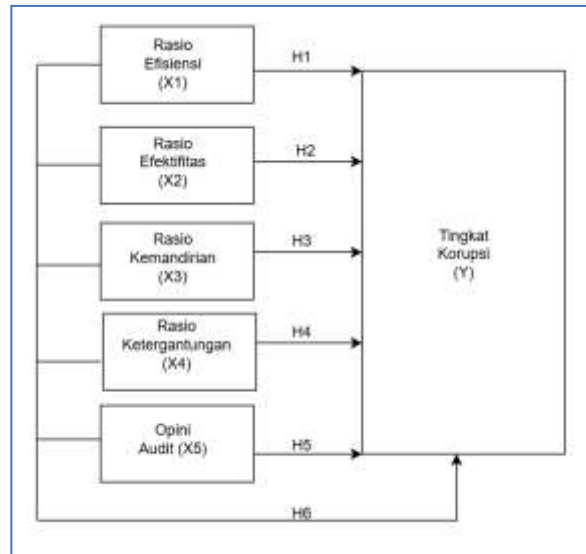
H5: Opini audit diasosiasikan terhadap tingkat korupsi.

Kinerja Keuangan, Opini Audit dan Tingkat Korupsi (Simultan)

Kinerja keuangan dan opini audit merupakan dua elemen yang saling melengkapi dalam mencerminkan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang baik menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya secara efektif, sementara opini audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal untuk memastikan kepatuhan dan transparansi. Kombinasi antara kinerja keuangan yang optimal dan opini audit yang baik diharapkan mampu memperkuat akuntabilitas serta menekan peluang terjadinya perilaku oportunistik. Penelitian Christina et al. (2025) menemukan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah yang dipadukan dengan opini audit memiliki efek bersama terhadap tingkat korupsi di provinsi Indonesia. Penelitian lain oleh Panji & Utomo (2023), menjelaskan bahwa opini audit memiliki hubungan dengan tingkat korupsi, sementara Nindito & Khairunnisa (2023) menyoroti pentingnya tindak lanjut hasil audit dalam memperkuat akuntabilitas publik.

H6: Kinerja keuangan dan opini audit secara simultan diasosiasikan dengan tingkat korupsi.

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir
 Sumber: Data Diolah (2025)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan atau keterkaitan antara variabel independen dan variabel dependen tanpa mengklaim adanya hubungan kausal secara langsung (Oktrivina et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada identifikasi pola hubungan antara kinerja keuangan daerah, opini audit dan tingkat korupsi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di tingkat provinsi di Indonesia, dengan total 38 provinsi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian (Firmansyah et al., 2022). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Provinsi yang memiliki Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama periode 2018-2023.
2. Provinsi yang memiliki kasus korupsi menurut laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2018-2023.
3. Provinsi yang termasuk dalam 10 besar jumlah kasus korupsi menurut laporan penindakan kasus korupsi oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) selama periode 2018-2023.
4. Provinsi dengan kasus korupsi terbanyak secara kumulatif (sum of case) sepanjang tahun pengamatan 2018-2023

Berdasarkan kriteria tersebut, sepuluh provinsi dengan jumlah kasus korupsi tertinggi ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini. Dengan periode pengamatan selama enam tahun (2018–2023) dan sepuluh unit analisis (provinsi), maka total unit observasi (n) dalam penelitian ini adalah 60 (10 provinsi × 6 tahun). Penelitian ini menggunakan panel data dengan struktur *balanced panel*, dimana unit observasi yang diamati secara konsisten selama periode penelitian. Konsistensi entitas ini dijaga dengan menetapkan sepuluh provinsi yang terpilih awal periode tetap diamati hingga akhir periode terlepas dari fluktuasi peringkat kasus korupsi tahunan.

No.	Nama Provinsi	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Jumlah Kasus Korupsi Kumulatif
1	Jawa timur	52	19	42	42	52	64	271
2	Jawa barat	27	21	40	40	33	36	197
3	Jawa tengah	36	13	37	37	19	47	189

4	Sulawesi selatan	31	11	30	30	13	46	161
5	Nusa Tenggara Timur	11	5	34	34	30	37	151
6	Sumatera utara	23	7	18	18	19	54	139
7	Aceh	22	11	17	13	28	36	127
8	Bengkulu	16	10	17	9	24	29	105
9	Kalimantan tengah	15	5	23	23	15	19	100
10	Sulawesi tengah	6	10	21	21	10	13	81

Tabel 1. Sampel Penelitian
Sumber: Data Diolah(2025)

Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel	Pengukuran
Rasio Efisiensi (X1)	$RE = \frac{\text{Realisasi Total Belanja}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}}$ (Khalimatussa'diah & Haliah, 2025)
Rasio Efektivitas (X2)	$REF = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}}$ (Khalimatussa'diah & Haliah, 2025)
Rasio Kemandirian (X3)	$RK = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ (Khalimatussa'diah & Haliah, 2025)
Rasio Tingkat Ketergantungan (X4)	$RTK = \frac{\text{Total Pendapatan Dana Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$ (Khalimatussa'diah & Haliah, 2025)
Opini Audit (X5)	Variabel dummy berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 1 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 0
Tingkat Korupsi (Y)	Pengukuran tingkat korupsi dalam penelitian ini menggunakan jumlah kasus yang dipublikasikan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW), yang merefleksikan intensitas penindakan kasus korupsi, bukan semata-mata prevalensi korupsi aktual. Oleh karena itu, provinsi dengan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat berpotensi menunjukkan jumlah kasus yang lebih tinggi, meskipun tingkat korupsi riilnya belum tentu lebih besar.

Tabel 2. Pengukuran Variabel
Sumber: Data diolah (2025)

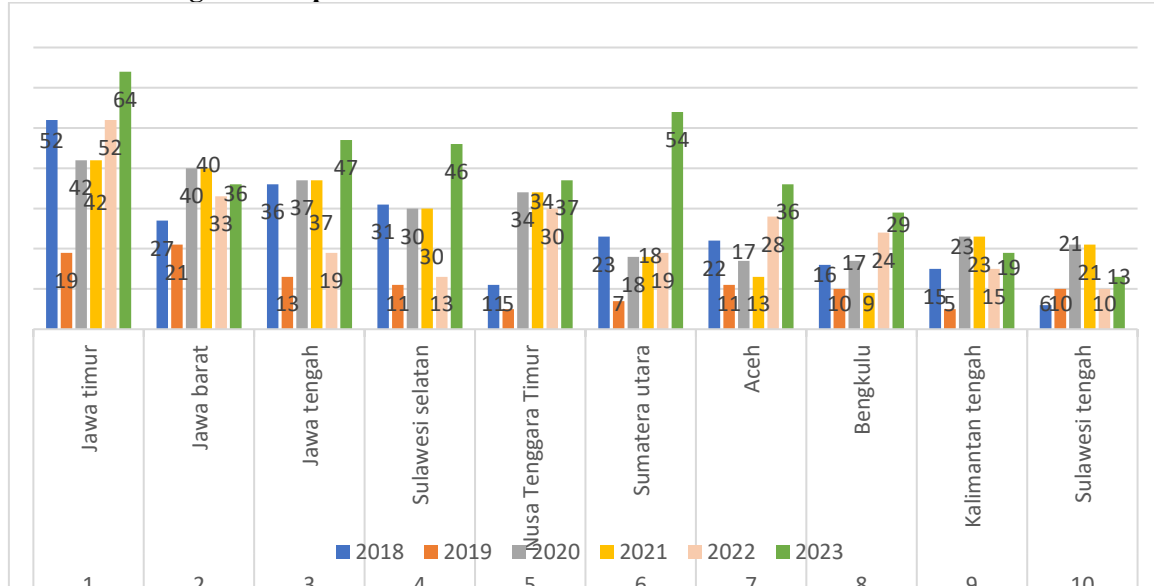
Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan pendekatan *pooled regression*. Pendekatan ini dipilih karena jumlah unit *cross-sectional* yang terbatas, sehingga penggunaan model panel dengan efek tetap atau acak dinilai kurang efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antar variabel secara asosiatif, bukan untuk menarik kesimpulan sebab-akibat. Oleh karena itu, analisis difokuskan pada pengidentifikasian pola hubungan umum antara kinerja keuangan daerah, opini audit, dan tingkat korupsi. Dengan mempertimbangkan tujuan dan keterbatasan tersebut, penggunaan *pooled regression* dinilai sesuai

untuk menjawab tujuan penelitian. Seluruh proses pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS).

HASIL

Analisis Demografi Sampel



Gambar 2. Diagram Sampel Penelitian

Sumber: Data Diolah (2025)

Analisis data mengenai kasus korupsi di sepuluh provinsi dari tahun 2018 hingga 2023 menunjukkan adanya fluktuasi tahunan dan disparitas signifikan dalam jumlah kasus kumulatif antarwilayah. Secara keseluruhan, total kasus kumulatif dari tahun 2018 hingga 2023 di sepuluh provinsi tersebut mencapai 1.821 kasus. Ditinjau dari tren tahunan, jumlah kumulatif kasus korupsi di sepuluh provinsi tersebut mengalami dinamika, yaitu 219 kasus pada 2018, 128 kasus pada 2019, 298 kasus pada 2020, 292 kasus pada 2021, 269 kasus pada 2022, dan 450 kasus pada 2023. Penurunan kasus signifikan tercatat antara tahun 2018 ke 2019, tetapi kemudian meningkat tajam pada tahun 2020, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023. Peningkatan pada 2020 dan 2023 mengindikasikan lonjakan aktivitas penindakan atau peningkatan praktik korupsi.

Berdasarkan perbandingan antarwilayah, Provinsi Jawa Timur tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus korupsi kumulatif terbanyak (271 kasus), menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki konsentrasi kasus yang tertinggi selama periode pengamatan. Sebaliknya, Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai provinsi dengan jumlah kasus kumulatif paling sedikit (81 kasus). Pola ini menggaris bawahi variasi geografis dalam penindakan atau prevalensi korupsi di Indonesia. Jika dikelompokkan berdasarkan pulau utama, Pulau Jawa memiliki jumlah kasus kumulatif terbanyak (657 kasus), diikuti oleh Pulau Sumatera (371 kasus), Pulau Sulawesi (242 kasus), Nusa Tenggara (151 kasus), dan Pulau Kalimantan (100 kasus). Konsentrasi kasus yang tinggi di Pulau Jawa dapat dikaitkan dengan faktor seperti tingginya aktivitas ekonomi, kepadatan penduduk, dan kompleksitas administrasi pemerintahan di wilayah tersebut. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan bahwa meskipun upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, kasus-kasus signifikan masih terjadi dengan pola geografis yang terpusat di pulau-pulau besar dan padat. Tingginya angka kumulatif pada tahun 2023 (450 kasus) menuntut perhatian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor penyebab peningkatan substansial kasus di tahun tersebut.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam analisis regresi linier, khususnya pada metode *Ordinary Least Squares* (OLS), merupakan serangkaian pengujian prasyarat yang harus dipenuhi agar hasil estimasi model menjadi valid, reliabel, dan efisien (*BLUE = Best Linear Unbiased Estimator*).

Tujuan utama uji asumsi klasik adalah untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengalami pelanggaran terhadap asumsi dasar seperti normalitas residu, homoskedastisitas atau varians kesalahan yang konstan, tidak adanya autokorelasi antar residu, serta tidak terdapat multikolinearitas antar variabel independen. Dengan terpenuhinya asumsi-asumsi tersebut, estimasi koefisien regresi dapat diinterpretasikan secara tepat, hasil uji statistik seperti uji t dan uji F menjadi valid, serta prediksi atau inferensi yang dihasilkan dari model menjadi lebih dapat dipercaya (Alwy Yusuf et al., 2024)

Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov)

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	10.45097384
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.085
Test Statistic		.088
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Keputusan mengenai penerimaan atau penolakan hasil uji ini didasarkan pada nilai signifikansi asimtotik dua sisi (*Asymp. Sig. (2-tailed)*). Nilai yang diperoleh adalah 0,200 lebih besar dari 0,05. Kesimpulan statistik dari uji ini adalah bahwa residual model memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas (Variance Inflation Factor)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	79.530	38.786		2.050	.045		
	Rasio Efisiensi (X1)	25.440	14.994	.196	1.697	.096	.826	1.211
	Rasio Efektivitas (X2)	-8.532	11.068	-.083	-.771	.444	.939	1.065
	Rasio Kemandirian (X3)	-26.911	22.321	-.360	-	.233	.123	8.101
	Rasio Ketergantungan (X4)	-78.232	24.125	-.860	-	.002	.157	6.387
	Opini Audit (X5)	-12.922	17.394	-.123	-.743	.461	.401	2.493

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi (Y)

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Dari tabel diatas, diketahui nilai Tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Model		Coefficients ^a					Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	26.813	19.622		1.366	.177		
	Rasio Efisiensi (X1)	2.555	7.586	.048	.337	.738	.826	1.211
	Rasio Efektivitas (X2)	-7.981	5.599	-.190	-1.425	.160	.939	1.065
	Rasio Kemandirian (X3)	-13.063	11.293	-.425	-1.157	.252	.123	8.101
	Rasio Ketergantungan (X4)	-14.246	12.205	-.381	-1.167	.248	.157	6.387
	Opini Audit (X5)	1.363	8.800	.032	.155	.877	.401	2.493

a. Dependent Variable: ABS-RES

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan Uji Park pada tabel di atas, diketahui bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi (Sig.) lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi (Run Test)

Runs Test	
Test Value ^a	Unstandardized Residual
Cases < Test Value	1.12622
Cases >= Test Value	30
Total Cases	30
Number of Runs	60
Z	26
Asymp. Sig. (2-tailed)	-1.302
a. Median	.193

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi menggunakan Run Test yang ditunjukkan, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,193 artinya lebih besar dari tarif signifikansi 0,05 sehingga dapat disimpulkan pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Linear Berganda

Uji analisis linear berganda merupakan metode statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan. Dalam model ini, hubungan antar variabel dijelaskan melalui persamaan regresi yang melibatkan lebih dari satu faktor penentu, sehingga dapat menggambarkan hubungan yang lebih kompleks dan realistis dibandingkan regresi sederhana. Analisis ini membantu peneliti untuk memahami sejauh mana variabel bebas secara bersama-sama maupun parsial berkontribusi terhadap perubahan pada variabel terikat, dengan tetap memperhatikan hubungan linear antar (Firmansyah et al., 2022).

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	79.530	38.786		2.050	.045		
	Rasio Efisiensi (X1)	25.440	14.994	.196	1.697	.096	.826	1.211
	Rasio Efektivitas (X2)	-8.532	11.068	-.083	-.771	.444	.939	1.065
	Rasio Kemandirian (X3)	-26.911	22.321	-.360	-	.233	.123	8.101
	Rasio Ketergantungan (X4)	-78.232	24.125	-.860	-	.002	.157	6.387
	Opini Audit (X5)	-12.922	17.394	-.123	-.743	.461	.401	2.493

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi (Y)

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Berdasarkan analisis tersebut dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 79,530 + 25,440 (\text{Rasio Efisiensi } X1) - 8,532 (\text{Rasio Efektivitas } X2) - 26,911 (\text{Rasio kemandirian } X3) - 78,232 (\text{Rasio ketergantungan } X4) - 12,922 (\text{Opini Audit } X5)$$

Uji Hipotesis (Uji t)

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	79.530	38.786		2.050	.045		
	Rasio Efisiensi (X1)	25.440	14.994	.196	1.697	.096	.826	1.211
	Rasio Efektivitas (X2)	-8.532	11.068	-.083	-.771	.444	.939	1.065
	Rasio Kemandirian (X3)	-26.911	22.321	-.360	-	.233	.123	8.101
	Rasio Ketergantungan (X4)	-78.232	24.125	-.860	-	.002	.157	6.387
	Opini Audit (X5)	-12.922	17.394	-.123	-.743	.461	.401	2.493

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi (Y)

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, jika nilai thitung > ttabel dan Signifikansi <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Statistik Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4395.502	5	879.100	7.367	.000 ^b
	Residual	6444.148	54	119.336		
	Total	10839.650	59			

a. Dependent Variable: Tingkat Korupsi (Y)

b. Predictors: (Constant), Opini Audit (X5), Rasio Ketergantungan (X4), Rasio Efektivitas (X2), Rasio Efisiensi (X1), Rasio Kemandirian (X3)

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Berdasarkan tabel diatas, jika nilai Signifikansi <0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.637 ^a	.406	.350	10.92411	1.395

a. Predictors: (Constant), Opini Audit (X5), Rasio Ketergantungan (X4), Rasio Efektivitas (X2), Rasio Efisiensi (X1), Rasio Kemandirian (X3)

b. Dependent Variable: Tingkat Korupsi (Y)

Sumber: Pengelolaan data menggunakan SPSS versi 27 (2025)

Secara keseluruhan, model regresi menunjukkan bahwa lima variabel independen (Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, Rasio Kemandirian, Rasio Ketergantungan, dan Opini Audit) memiliki hubungan yang kuat dengan Tingkat Korupsi, dengan nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,637. Berdasarkan *Adjusted R Square*, kelima variabel tersebut secara simultan memberikan kontribusi sebesar 35% dalam menjelaskan variasi Tingkat Korupsi, sementara sisanya sebesar 65% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model penelitian.

PEMBAHASAN

Rasio efisiensi diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Berdasarkan hasil uji parsial, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa rasio efisiensi berasosiasi dengan tingkat korupsi tidak didukung secara empiris. Nilai signifikansi sebesar 0,096 menunjukkan bahwa hubungan antara efisiensi anggaran dan tingkat korupsi tidak signifikan secara statistik, meskipun koefisien regresi menunjukkan arah hubungan positif. Hasil ini sejalan dengan pandangan Nindito & Khairunnisa (2023) yang menekankan bahwa efisiensi anggaran tanpa disertai mekanisme pengawasan yang kuat tidak secara otomatis mampu menekankan praktik korupsi.

Rasio efektivitas diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Hasil uji parsial terhadap rasio efektivitas (X2) juga menunjukkan tidak adanya asosiasi yang signifikan dengan tingkat korupsi, dengan nilai signifikansi sebesar 0,444. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif, hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak serta-merta mencerminkan rendahnya tingkat korupsi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja keuangan yang bersifat formal dan administratif belum tentu diikuti oleh peningkatan integritas dalam praktik pengelolaan publik. Dengan demikian, rasio efektivitas PAD tidak dapat dijadikan indikator tunggal dalam menjelaskan variasi tingkat korupsi antar daerah.

Rasio kemandirian diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Rasio kemandirian (X3) juga tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi. Temuan ini berbeda dengan hasil (Azizi Yusuf & Hari Suryaningrum, 2022) yang menemukan bahwa kemandirian fiskal berkontribusi terhadap penurunan korupsi. Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa peningkatan otonomi fiskal di Indonesia belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan akuntabilitas dan pengawasan internal. Dalam kerangka teori agensi (Jensen & Meckling, 1976) kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kewenangan agen tanpa pengendalian yang memadai justru dapat mempertahankan peluang terjadinya perilaku oportunistik.

Rasio ketergantungan diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Berbeda dengan variabel lainnya, rasio ketergantungan (X4) menunjukkan asosiasi yang signifikan dengan tingkat korupsi. Nilai signifikansi sebesar 0,002 menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer memiliki hubungan yang bermakna dengan variasi tingkat korupsi. Temuan ini dapat dijelaskan oleh karakteristik dana transfer dari pemerintah pusat. Umumnya pengawasan dan aturan penggunaan dana transfer lebih ketat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Transfer Khusus (DTK) memiliki tujuan penggunaan yang sudah ditentukan serta harus dipertanggungjawabkan melalui sistem pelaporan tertentu. Kondisi ini membuat pemerintah daerah memiliki ruang gerak yang lebih terbatas dalam mengelola dana tersebut, sehingga peluang terjadinya penyimpangan dan praktik korupsi menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, ketergantungan fiskal dalam penelitian ini tidak selalu menunjukkan lemahnya tata kelola keuangan daerah, tetapi justru dapat berfungsi sebagai bentuk pengawasan eksternal yang membantu membatasi perilaku penyalahgunaan kewenangan di tingkat daerah.

Opini audit diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Hasil uji parsial terhadap opini audit (X5) menunjukkan tidak adanya asosiasi yang signifikan dengan tingkat korupsi. Meskipun sebagian besar provinsi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), temuan ini memperkuat argumen (Triya Setia Ningsih, 2022) bahwa opini audit lebih merefleksikan kepatuhan formal terhadap standar akuntansi daripada efektivitas pencegahan korupsi. Selain itu, ketidaksignifikanan opini audit terhadap tingkat korupsi dapat dijelaskan melalui keterbatasan ruang lingkup audit keuangan pemerintah. Audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada dasarnya bertujuan untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, bukan untuk secara khusus mendeteksi praktik korupsi yang bersifat non-akuntansi seperti suap, kolusi, dan konflik kepentingan (Siregar & Agoes, n.d.).

Kinerja keuangan dan opini audit secara simultan diasosiasikan dengan tingkat korupsi

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah dan opini audit secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi, dengan nilai *Adjusted R²* sebesar 0,350. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dipengaruhi oleh indikator keuangan atau opini audit secara individual, tetapi muncul sebagai fenomena tata kelola sistematis yang baru terlihat ketika indikator diuji secara simultan. Dalam perspektif teori agensi Jensen & Meckling (1976) hasil ini menegaskan bahwa korupsi merupakan fenomena tata kelola yang bersifat sistemik, di mana kelemahan dalam pengelolaan keuangan dan mekanisme pengawasan saling berinteraksi dalam menciptakan peluang perilaku oportunistik. Temuan ini juga sejalan dengan (Nindito & Khairunnisa, 2023) serta (Shidqi & Arfiansyah, 2025) yang menekankan pentingnya pendekatan tata kelola terpadu dalam upaya pengendalian korupsi di sektor publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis regresi terhadap 60 observasi dari sepuluh pemerintah provinsi di Indonesia selama periode 2018–2023, penelitian ini menemukan bahwa secara parsial rasio efisiensi, rasio efektivitas, rasio kemandirian, dan opini audit tidak menunjukkan asosiasi yang signifikan dengan tingkat korupsi. Sebaliknya, rasio ketergantungan fiskal menunjukkan hubungan yang signifikan dengan tingkat korupsi, yang mengindikasikan bahwa struktur pendapatan daerah, khususnya ketergantungan terhadap dana transfer, memiliki peran penting dalam menjelaskan variasi korupsi antar daerah. Secara simultan, kinerja keuangan daerah dan opini audit mampu menjelaskan variasi tingkat korupsi, meskipun sebagian besar indikator tidak signifikan secara individual. Temuan ini menunjukkan bahwa korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari kinerja keuangan tertentu atau kualitas pelaporan keuangan formal. Dengan kata lain, capaian kinerja keuangan dan opini audit yang baik tidak secara otomatis mencerminkan rendahnya praktik korupsi di pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa opini audit berfungsi sebagai mekanisme kepatuhan dan pelaporan keuangan, bukan sebagai alat pencegahan korupsi secara langsung.

Ketidaksignifikanan opini audit secara parsial mengindikasikan bahwa praktik korupsi lebih banyak terjadi pada ranah operasional dan tata kelola, yang tidak sepenuhnya tercermin dalam laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini mendukung pandangan teori agensi bahwa korupsi merupakan fenomena tata kelola yang bersifat sistemik, di mana kelemahan dalam pengelolaan keuangan, struktur fiskal, dan mekanisme pengawasan saling berinteraksi dalam menciptakan peluang perilaku oportunistik. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi di pemerintah daerah tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kinerja keuangan atau perolehan opini audit yang baik, tetapi harus diarahkan pada penguatan tata kelola secara menyeluruh, termasuk transparansi fiskal, efektivitas pengawasan, dan integritas kelembagaan.

REFERENSI

- Alif, M., Irvan, N., & Amalia, E. (2025). How Accountability Shapes the Impact of Government Effectiveness on Corruption Outcomes. *Corruption Outcomes. E-Jurnal Akuntansi*, 35(8), 2293–2304. <https://doi.org/10.24843/EJA.2025.v35.i08.p09>
- Alwy Yusuf, M., Abraham, A., Rukmana, H., Negeri Makassar, U., P Pettarani, J. A., Rappocini, K., Makassar, K., & Selatan, S. (2024). Analisis Regresi Linier Sederhana dan Berganda Beserta Penerapannya. *Journal on Education*, 06(02).
- Azizi Yusuf, M., & Hari Suryaningrum, D. (2022). *Moderasi Ukuran IPemerintah Daerah Pada Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah dan Transparansi Daerah Terhadap Tingkat Korupsi*. 18, 98–112. <http://dx.doi.org/10.24217>
- Budiantoro, H., Oktavia, D., Agus Tantri Ningsih, H., & Primadini, A. (2025). Jurnal Akuntansi dan Manajemen The effect of profitability, financial distress, debt default, audit client tenure, audit lag on going concern audit opinion. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 22(2), 187–204. <https://doi.org/10.36406/jam.v22i2.206>
- Christina, E., Saragih, B., & Setiyawati, H. (2025). *Audit, Fiscal, and Capital Expenditure: Determinants of Local Government Corruption* (Vol. 05, Issue 2).
- Falah, A. S., & Mubarokiyah, L. (2022). *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN (STUDI KASUS PADA PT. ARTHAVEST TBK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2020)*. 9. <https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/equi>
- Fathiyah, F., Iskandar Nasution, Bambang Niko Pasla, Fahmi Rasid, & Muhammad Arif. (2022). Ratio Analysis of Regional Dependence and Independence in Measuring the Regional Financial Capability of the Jambi Provincial Government. *Jurnal Prajaiswara*, 3(1), 65–74. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v3i1.43>
- Firmansyah, D., Pasim Sukabumi, S., & Al Fath Sukabumi, S. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE. In *Journal of Financial Economics* (Vol. 3). Q North-Holland Publishing Company.
- Khalimatussa'diah, K., & Haliah, H. (2025). Analysis of the Financial Independence Ratio of Makassar City Government During the Second Term of Mohammad Ramdhan Pomanto's Leadership. *Asian Journal of Management Analytics*, 4(3), 1073–1084. <https://doi.org/10.55927/ajma.v4i3.14794>
- Li, Y., WenXiu, H., & ZhenXing, S. (2023). Impact of Local Official Corruption on Local Government Debt in China: The Mediating Role of Government Investment Efficiency. *SAGE Open*, 13(3). <https://doi.org/10.1177/21582440231184976>
- Maria, E., Halim, A., & Suwardi, E. (2021). Financial Distress, Regional Independence and Corruption: An Empirical Study in Indonesian Local Governments. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 4(1), 54–70. <https://doi.org/10.33005/jasf.v4i1.159>
- Nindito, T., & Khairunnisa, M. (2023). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT, DAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *Perpajakan Dan Auditing*, 4(2), 506–525. <http://journal.unj.ac.id/journal/index.php/japa>

- Nurchahyo, A. D., & Mahi, B. R. (2022). Analisa Dana Transfer Pusat dan Probabilitas Terjadinya Korupsi di Tingkat Pemerintah Daerah. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 8(1), 95–102. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.862>
- Oktrivina, A., Nelyumna, N., Harnovinsah, H., Atikah, S., & Sujana, A. P. (2025). Pengaruh ESG score terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 22(2), 117–134. <https://doi.org/10.36406/jam.v22i2.186>
- Panji, I., & Utomo, D. C. (2023). PENGARUH OPINI AUDIT DAN TEMUAN AUDIT TERHADAP TINGKAT KORUPSI PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah Tahun 2015-2020). *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 12(2), 1–9. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purba, S., Purba, R. A., Simangunsong, L. Y., Gultom, N. A. V. E., & Sinaga, A. P. R. (2024). Measuring Local Government Financial Performance With Financial Ratios. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 8(1), 84–100. <https://doi.org/10.46367/jas.v8i1.1835>
- Rafsanjani, M., & Sumiati, S. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Management Risiko Dan Keuangan*, 3(4), 395–408. <https://doi.org/10.21776/jmrk.2024.03.4.08>
- Safitri, Y., Rama, A., & Barusman, P. (2025a). The Effect of Audit Findings and Audit Opinions on the Level of Corruption of the Regional Government of Lampung Province. In *International Journal of Education* (Vol. 5, Issue 1). <http://lppppublishing.com/index.php/ijessm>
- Shidqi, F., & Arfiansyah, Z. (2025). Good governance and corruption in local governments: The role of internal control and audit. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 29(1), 2025. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i>
- Siregar, D. A., & Agoes, S. (n.d.). Audit dan Transparansi dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah: Dampaknya terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Indonesia, Bulan*, 2025(11). <http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index>
- Siswanto, S., & Maylani, D. A. (2022). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 11(1), 184–195. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i1.48423>
- Suyatmiko, W. (2021). *CORRUPTION PERCEPTION INDEX*.
- Tartila Seisha Syaputri, Periansya, & Sri Hartaty. (2025). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019-2023. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*.
- Triya Setia Ningsih, S. (2022). PENGARUH TEMUAN AUDIT, OPINI AUDIT DAN TRANSPARANSI TERHADAP TINGKAT KORUPSI. *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, 11, 1–11. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Zarkasyi Rahman, A., & Lintang Saputra, F. (2022). Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Cilacap. 22(2), 117–126. <https://doi.org/10.21831/hum.v22i2>
- Zulhaerini, A., Din, M., Jurana, J., & Mustamin, M. (2025). *THE IMPACT OF AUDIT FINDINGS AND FOLLOW-UP ON RECOMMENDATIONS ON AUDIT OPINION: A STUDY OF LOCAL GOVERNMENTS IN DISTRICTS/CITIES IN CENTRAL SULAWESI PROVINCE*.